



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I		
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II		
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal Renja	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III		
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3 Program dan Kegiatan	39
BAB IV		
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V		
PENUTUP	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tabel T.C.29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023 (Tahun Berjalan)	9
Tabel 2.	Tabel T.C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD	18
Tabel 3.	Rincian Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi	19
Tabel 4.	Tabel T.C.31. Review Terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2025	24
Tabel 5.	Tabel T.C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	33
Tabel 6.	Tujuan dan Sasaran SatpolPP Tahun 2025	38
Tabel 7.	Tabel T.C.33. Rumusan Perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	44



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas BerkatNya dan RahmatNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 masih tetap memuat Visi dan Misi Kepala Daerah dalam peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta memuat kebijakan pemerintah secara menyeluruh termasuk instrument anggaran.

Dengan demikian Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan yang merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Rankhir Renja ini, selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan program/kegiatan atau Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 oleh masing-masing bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 16 Juli 2024

KEPALA SATUAN,



MESAK ADIANTO, S. Sos., M. Si

NIP. 10700810 199803 1 008



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD, hal ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja SKPD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD dan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Nunukan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 Tentang EKPPD ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



- Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Tahapan Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Permenpan dan RB. Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemuktahiran Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daderah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021;
 15. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 59 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan;



16. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 13 tahun 2023 tentang Rencana kerja perangkat daerah;
17. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang RencanaKerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025;
18. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 Nomor : 188.4/37/SATPOL.PP/XII/2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai :

- Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat arah kebijakan urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- Bahan acuan seluruh komponen penyelenggaraan pemerintah urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah untuk :

- Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- Pedoman penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Tahun 2025 dan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025



1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penyusunan rencana kerja

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang Evaluasi program dan kegiatan tahun 2020 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BABA IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang rencana kerja dan pendanaan Program, dan Kegiatan SKPD

BAB V PENUTUP

Berisi tentang catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana Tindak lanjut dan harapan dari Kepala SKPD.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja selain merupakan wujud pertanggungjawaban Satpol PP Kabupaten Nunukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran, tujuan, organisasi sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis lewat pelaksanaan program dan kegiatan.

faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

1. Terbatasnya pelayanan kepada masyarakat terutama pada wilayah 3, 4, dan 5 Hal ini disebabkan kurangnya personil bahan pada 4 Kecamatan Tidak Tersedia personil Satpol. PP yaitu pada Kecamatan Sei Manggaris, Kecamatan Sembakung Atualy, Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan.
2. Pelaksanaan koordinasi bersama OPD selaku Pemangku Perda, Instansi vertikal, TNI/Polri masih kurang.
3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi lintas sector secara internal yang berpotensi terhadap kewenangan, Operasionalisasi pelaksanaan kegiatan dan tanggungjawab.



4. Terbatasnya anggaran pada kegiatan prioritas seperti kegiatan operasional Patroli Wilayah, ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Perda dan Perkada sehingga jangkauan terhadap pelaksanaan kegiatan juga terbatas. Saat ini penanganan kasus masih dominan pada wilayah Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan serta dan di beberapa Kecamatan di wilayah pulau Sebatik.
5. Keterbatasan ruang gerak PPNS Satpol. PP dalam melakukan tindakan sesuai kewenangannya, hal ini disebabkan oleh Kepala Satpol PP belum berstatus PPNS sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan;
6. Kurang optimalnya Koordinasi dengan OPD selaku Pemangku Perda, Instansi vertikal dan TNI/Polri.
7. Peraturan tentang Penerapan SPM masih belum dapat dipahami sepenuhnya.

Implikasi terhadap capaian program renstra perangkat daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

1. Mengusulkan penambahan alokasi jumlah personil baik PNS maupun Non PNS untuk di tempatkan pada wilayah kecamatan terutama pada wilayah kecamatan yang tidak memiliki personil Satpol PP;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas terhadap lintas sector pada setiap permasalahan terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Membangun kerjasama lintas OPD selaku Pemangku Perda, Instansi vertikal maupun TNI/Polri dan membangun sinergitas dengan Kecamatan dalam upaya melakukan operasi dan penindakan pembinaan terhadap pelanggaran yang berdampak pada Gangguan Trantibum di wilayah kecamatan;



3. Konsolidasi pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan dengan melakukan sinkronisasi tugas dan fungsi sesuai Tugas, Fungsi dan kewenangan, sehingga tidak terjadi tarik ulur terhadap tugas dan tanggung jawab yang bermuara pada duplikasi terhadap pelaporan.
4. Mengusulkan alokasi anggaran prioritas pada kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan operasional lapangan yang dapat menjangkau pada wilayah seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Nunukan.
5. Mengusulkan Kepala Satpol. PP untuk di prioritaskan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen PPNS;
6. Koordinasi dan Peningkatan Sinergitas serta membangun kerjasama lintas OPD selaku Pemangku Perda dan Perkada, Instansi vertikal maupun TNI/POLRI secara berkelanjutan;
7. Peningkatan Koordinasi dan merencanakan untuk melakukan studi banding pada Satpol PP yang telah melaksanakan Penerapan SPM dengan baik.

dari uraian tersebut diatas dapat disajikan kedalam tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah sebagai berikut :



TABEL TC.29
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 (TAHUN BERJALAN)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026 (Akhir Periode Resntra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD tahun 2023 (Tahun lalu n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2024(Tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2023 (Tahun berjalan/n-1)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	500	100	100	100	100	100	300	60,00
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	50	20	10	10	100	10	40	80,00



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	2	1	1	100	1	4	80,00
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45	18	9	9	100	9	36	80,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	70	28	14	14	100	14	56	80,00
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79	74	79	75	94,936709	79	228	288,61
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600	0	150	262	0	150	412	68,67
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28	0	7	7	0	7	14	50,00
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	0	3	3	0	3	6	50,00



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian	25	5	7	7	100	5	17	68,00
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	2	2	2	100	1	5	100,00
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	15	2	2	100	2	19	105,56
1.05.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	35	20	20	100	20	75	75,00
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	25	5	7	7	100	5	17	68,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1	1	1	100	1	3	60,00
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19	3	4	4	100	4	11	57,89
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	7	7	7	100	4	18	51,43
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	0	#DIV/0!	3	3	#DIV/0!



**Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025**

1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137	23	25	24	96	28	75	54,74
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	6	0	1	0	0	1	1	16,67
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6	0	1	0	0	1	1	16,67
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120	24	24	24	100	24	72	60,00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60,00
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	36	60,00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan	17	14	16	16	100	16	46	270,59
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9	9	9	100	9	27	300,00



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	5	5	5	100	5	15	300,00
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	0	2	2	0	2	4	133,33
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	500	142	100	124	124	100	366	73,13
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2515	713	503	622	124	503	1838	73,08
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2500	709	500	619	124	500	1828	73,12
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	15	4	3	3	100	3	10	66,67



**Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025**

1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10	2	2	2	100	2	6	60,00
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1200	240	240	240	100	240	720	60,00
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5117	0	1542	1624	105	30	1654	32,32
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	70	10	12	12	100	14	36	51,43
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	20	4	4	4	100	4	12	60,00



**Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025**

1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	40	8	5	5	100	8	21	52,50
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	250	0	5	5	0	3	8	3,20
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	240	48	40	40	100	50	138	57,50
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	250	50	50	50	100	50	150	60,00
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	10	1	2	1	50	2	4	40,00



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	10	1	2	1	50	2	4	40,00
-----------------	--	---	----	---	---	---	----	---	---	-------



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) menetapkan dua indikator. Adapun indikator tersebut dapat disajikan kedalam tabel seperti dibawah ini :



TABEL T.C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun		Proyeksi Tahun	Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penanganan pelanggaran Ketentraman dan ketertiban masyarakat		100	100	100	100	100	100	100	100	100	Relasiasi 2023 dan Proyeksi 2024 menggunakan persentase target realisasi program
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten.	100		100	100	100	100	100	100	100	100	Relasiasi 2023 dan Proyeksi 2024 menggunakan persentase target realisasi Kegiatan



Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran

RINCIAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN TEKNIK MONITORING DAN EVALUASI

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	TEKNIK MONITORING DAN EVALUASI
1	Persentase Penanganan pelanggaran Ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3) yang ditangani/Jumlah laporan atau teridentifikasi X 100%	Data bersumber dari Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni data laporan dari masyarakat atau hasil Identifikasi pelanggaran K3 oleh Satpol PP melalui kegiatan Patroli, Pendataan dan Pengawasan	Recheck data dan perhitungan, konsultasi ke bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja sasaran per triwulan
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada / Jumlah warga Negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum perda dan perkada x 100%	Data bersumber dari Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah yakni data hasil penegakan peraturan daerah yang memiliki dampak kepada warga Negara sesuai Peraturan yang berlaku.	Berpedoman pada data sesuai peraturan, Recheck data dan perhitungan, konsultasi ke bidang Penegakan, melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja sasaran per triwulan



2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan adapun isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut :

- Peningkatan Pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada.
- Optimalisasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat.
- Peningkatan Koordinasi antar instansi terkait Perda/Perkada.
- Peningkatan Koordinasi dan konsultasi lintas bidang dan bagian pada internal Satpol PP.
- Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur.
- Dukungan sarana dan prasana.

Permasalahan dan hambatan yang dialami selama pada 2023 dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan

Dalam upaya merealisasikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2021 – 2026, banyak menemui Berbagai Permasalahan dan Hambatan baik dari dalam (Intern) maupun dari luar (Eksteren). Untuk itu dituntut peran serta dan kerjasama yang sinergi dari seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja,



lintas instansi, Aparat penegak hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya

Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya Sinergitas antar lembaga/instansi, Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum lainnya;
- b. Koordinasi dan komunikasi lintas bidang serta bagian secara internal belum berjalan dengan baik;
- c. Jumlah personil masih belum memadai dibanding dengan tugas, fungsi dan letak geografis wilayah yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan Negara lain.
- d. Kurangnya aparatur yang menguasai permasalahan dengan spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni.
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional yang masih kurang lengkap.
- f. Sebagian masyarakat belum taat melaksanakan Perda maupun Perkada.

Dengan permasalahan dan hambatan tersebut diatas akan sangat berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang telah dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terhadap capaian program Nasional terutama pada Satuan Polisi Pamong Praja yang terdapat pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).



2.3.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dalam upaya peningkatan pelayanan perangkat daerah menghadapi berbagai macam tantangan, diantaranya :

1. Rendahnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah antara lain ditandai dengan :
 - a. Maraknya pembangunan rumah/toko/gedung baru yang tidak memiliki dan/atau tidak sesuai dengan IMB serta melewati GSB.
 - b. Maraknya tempat usaha yang berdiri tanpa dilengkapi dengan perijinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan mengatur tentang Penyelenggaraan hiburan umum, pengelolaan kebersihan dan Perijinan.
2. Maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktifitas diatas trotoar, badan jalan, pertokoan dan fasilitas umum lainnya.
3. Sinergitas kepada OPD pengampuh Perda masih kurang.
4. Masih kurangnya kemampuan dan kapasitas personil.
5. Terbatasnya personil dan sarana prasarana pendukung kegiatan operasional.

Dengan adanya tantangan tersebut, maka peluang Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Melakukan kegiatan Sosialisasi, Penertiban, Pengawasan, Penanganan dan Evaluasi demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Nunukan yang taat dan patuh pada Perda dan Perkada;
2. Melaksanakan operasi patroli pengawasan secara intensif dalam upaya menekan maraknya PKL yang beraktifitas diatas



trotoar, badan jalan/bahu jalan, pertokoan dan fasilitas umum lainnya;

3. Terjalannya koordinasi antara PD teknis sebagai pemangku Perda dan *Stakeholder* dalam melaksanakan kegiatan penegakan Perda;
4. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peningkatan jumlah kuantitas personil dan pemenuhana sarana prasarana pendukung kegiatan operasional.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Bahwa pada Rancangan awal Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025, Prioritas Program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan yang tentunya menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2025. Secara spesifik review rancangan awal RKPD dan hasil kebutuhan yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan kebutuhan pendanaan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan, hal ini dikarenakan adanya tambahan kegiatan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dapat disampaikan kedalam Tabel dibawah ini.



TABEL TC. 31
REVIEW TERHADAP RENJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

NO.	RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2025					CATATAN OPD
	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERTILINDUNGAN MASYARAKAT				14.557.746.988,80	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERTILINDUNGAN MASYARAKAT				17.779.419.053,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah		100%	12.078.674.083,80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah		100%	14.192.298.106,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Kabupaten Nunukan	10 Dokumen	47.255.223	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Kabupaten Nunukan	10 Dokumen	187.113.350	



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	1 Dokumen	10.711.830	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	1 Dokumen	38.210.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	9 Dokumen	36.543.393	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	9 Dokumen	148.902.850	Adanya kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam bentuk Rakor dan Bimtek
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kabupaten Nunukan	14 Bulan	8.169.361.453	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kabupaten Nunukan	14 Bulan	9.592.597.548	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	79 Orang/Bulan	8.139.499.934	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	79 Orang/Bulan	9.494.481.248	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Nunukan	150 Dokumen	11.031.317	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Nunukan	150 Dokumen	49.652.300	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Nunukan	7 Dokumen	11.133.934	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Nunukan	7 Dokumen	37.848.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Nunukan	3 Laporan	Rp 7.696.268	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Nunukan	3 Laporan	Rp 10.616.000	



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian		5 Unit	241.281.147	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian		5 Unit	271.189.400	Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan mutu layanan)
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Nunukan	1 Paket	202.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Nunukan	1 Paket	202.290.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Nunukan	2 Orang	Rp 25.654.225	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Nunukan	2 Orang	Rp 46.886.400	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Nunukan	20 Orang	Rp 13.126.922	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Nunukan	20 Orang	Rp 22.013.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum		5 Unit	214.572.814	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum		5 Unit	387.350.480	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	1 Paket	5.643.930	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	1 Paket	5.643.880	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	4 Paket	29.635.761	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	4 Paket	177.351.890	Pemenuhan fasilitas sarana perkantoran
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	4 Paket	36.215.505	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	4 Paket	52.836.710	Adanya tambahan pagu penyediaan barang cetak dan penggandaan



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	3 Paket	17.317.166	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	3 Paket	-	Dialihkan pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor (penyesuaian nomenklatur)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Nunukan	30 Laporan	125.760.452	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Nunukan	30 Laporan	151.518.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		2 Unit	Rp 78.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		2 Unit	Rp 249.750.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	2 Unit	78.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	2 Unit	249.750.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan	3.139.051.815	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan	3.244.288.188	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	Rp 93.268.923	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	Rp 114.186.000	Adanya kenaikan penggunaan beban listrik dan mengantisipasi terjadinya musim kemarau untuk pembelian air tangki



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	Rp 3.045.782.892	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	Rp 3.130.102.188	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan		16 Unit	Rp 189.151.632	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan		16 Unit	Rp 260.009.140	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Nunukan	9 Unit	117.469.633	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Nunukan	9 Unit	188.356.120	Adanya penambahan kendaraan sebanyak 5 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Nunukan	5 Unit	Rp 8.978.979	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Nunukan	5 Unit	Rp 8.950.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Nunukan	2 Unit	Rp 62.703.020	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Nunukan	2 Unit	Rp 62.703.020	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		100%	2.479.072.905,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		100%	3.587.120.947,00	Program Indikator Kinerja Utama (IKU)



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Kabupaten Nunukan	500 Kasus	2.131.372.070	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Kabupaten Nunukan	503 Kasus	2.787.651.295	Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan mutu layanan)
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kabupaten Nunukan	500 Kasus	1.181.258.243	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kabupaten Nunukan	500 Kasus	1.269.173.485	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kabupaten Nunukan	3 Kasus	47.982.772	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kabupaten Nunukan	3 Kasus	71.008.750	Indikasi terjadinya demonstrasi lebih sedikit, Berdasarkan laporan pelaksanaan demonstrasi unjuk rasa sebanyak 3 kali
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	2 Dokumen	375.316.257	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	2 Dokumen	387.377.250	



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keteriban Umum	Kabupaten Nunukan	240 Dokumen	159.457.201	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keteriban Umum	Kabupaten Nunukan	240 Dokumen	180.933.700	Menindaklanjuti Instruksi Kemendagri No. 300.1.4/4980/BAK Terkait pengalokasian Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana satgas linmas dan Anggota Satlinmas
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Nunukan	25 Orang	183.254.613	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Nunukan	25 Orang	656.763.110	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kabupaten Nunukan	16 Dokumen	112.504.081	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kabupaten Nunukan	16 Dokumen	176.607.500	Target capain naik, kerjasama antar lembaga lebih intens dalam rangka pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan keteriban umum
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kabupaten Nunukan	4 Laproran	71.598.903	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kabupaten Nunukan	4 Laproran	45.787.500	Sub Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan penerima layanan)



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan		8 Perda/Perkada	261.763.571	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan		8 Perda/Perkada	654.385.270	Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan mutu layanan)
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Kabupaten Nunukan	5 Laporan	65.439.920	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Kabupaten Nunukan	5 Laporan	80.287.500	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kabupaten Nunukan	60 Laporan	95.604.176	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kabupaten Nunukan	60 Laporan	276.093.270	Optimalisasi dan intensitas pengawasan terhadap pelanggaran perda/perkada yang berdampak terhadap peningkatan PAD (pembayaran pajak)
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kabupaten Nunukan	50 Laporan	100.719.475	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kabupaten Nunukan	50 Laporan	298.004.500	Optimalisasi dan intensitas pengawasan terhadap pelanggaran perda/perkada yang berdampak terhadap peningkatan PAD (pembayaran pajak)
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		2 Orang	85.937.264	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		2 Orang	145.084.382	Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan mutu layanan)



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kabupaten Bogor	2 Orang	85.937.264	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kabupaten Bogor	2 Orang	145.084.382	
--	--	---	-----------------	---------	------------	--	---	-----------------	---------	-------------	--



2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Pada pelaksanaan forum Musrenbang tingkat kecamatan se Kabupaten Nunukan, tidak terdapat usulan/masukkan maupun rekomendasi untuk menjadi Program/Kegiatan Satuan polisi Pamong Praja.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Nunukan

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN PENTING
		KECAMATAN	KELURAHAN / DESA			
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100,00%	
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	503 Kasus	
1	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	500 Kasus	



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

		Sebatik Tengah	Aji Kuning	Perlu adanya pengadaan mobil patroli perbatasan untuk mengawal keamanan di perbatasan	Disesuaikan	Usulan dalam SIPD
		Sebatik Tengah	Aji Kuning	Perlu adanya penertiban makanan kadaluarsa di desa	Disesuaikan	Usulan dalam SIPD
		Nunukan	Nunukan Tengah	Penyuluhan upaya pencegahan dan penanganan dalam rangka menjaga Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat..	Disesuaikan	Usulan dalam SIPD
		Sebatik Tengah	Aji Kuning	Bantuan operasional patroli penertiban petensi gangguan trantibum kecamatan sebatik tengah.	Disesuaikan	Usulan dalam SIPD
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3 Kasus	
		Sebatik Tengah	Aji Kuning	Perlu adanya penertiban parkir pasar dikarenakan ketika hari pasar banyak kendaraan yang parkir sembarangan yang membahayakan orang bnyak dan untuk mengurangi resiko kecelakaan	Disesuaikan	Usulan dalam SIPD
3	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum					-
		Sembakung	Tepian	Pos Jaga/Keamanan di desa karena desa tepian pintu masuk dari hilir di kecmatan sembakung yg berbatsan dengan Kabupaten KTT	Disesuaikan	Usulan dalam SIPD
		Nunukan Selatan	Selisun	Bantuan Sarana dan Prasarana Poskamling	Disesuaikan	Usulan dalam SIPD



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

		Sebatik Timur	Tanjung Harapan	Perlu adanya pembangunan/pengadaan Jaringan Seluler/Tower/BTS di RT 07 Desa Tanjung Harapan, karena di daerah RT 07 masih terisolasi dari jaringan seluler maupun internet	Disesuaikan	Usulan dalam SIPD
		Sebatik Timur	Tanjung Harapan	perlu adanya pengadaan/pembangunan Rumah Dinas di Kecamatan Sebatik Timur sebanyak 3 Unit, karena belum adanya rumah dinas di wilayah Kecamatan Sebatik Timur	Disesuaikan	Usulan dalam SIPD
		Nunukan Selatan	Nunukan Selatan	Pembangunan pagar pemakamam Muslim Jalan Dayak (600 m)	Disesuaikan	Usulan dalam SIPD
		Nunukan	Nunukan Tengah	Bantuan Pengadaan Poskamling dan Sarana Prasarana Poskamling	Disesuaikan	Usulan dalam SIPD
		Sebatik Tengah	Sungai Limau	Perlu adanya pengadaan Seragam Linmas dan Sosialisasi	Disesuaikan	Usulan dalam SIPD



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa *Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.* Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada.

Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
“Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sasaran Program



Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan indikator kegiatan Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Nunukan hanya saja masih belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan berbagai kendala yang dihadapi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan merupakan penjabaran atau implementasi dari RPJMD Kabupaten Nunukan. Adapun Tujuan Satpol PP Kabupaten Nunukan adalah "**Minimnya pelanggaran K3**".

Sedangkan Sasaran dari Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Nunukan adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang menggambarkan hal-hal yang akan dilakukan secara proporsional melalui program kegiatan yang bersifat spesifik, terinci serta dapat diukur serta dicapai. Berdasarkan maksud penetapan sasaran dalam kurun waktu satu tahun yang akan dicapai, yaitu "**Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat**". Adapun tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat digambarkan pada tabel III dibawah ini :



TUJUAN DAN SASARAN SATPOL PP TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Rumusan Indikator	Satuan	Target Kinerja 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Minimnya pelanggaran K3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Persentase pelanggaran K3 yang tertangani	Jumlah Pengaduan dan pelanggaran teridentifikasi yang diselesaikan / Jumlah pengaduan dan pelanggaran teridentifikasi yang masuk x 100 %	%	100%
			Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di kabupaten	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara / Jumlah warga Negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum perda dan perkara x 100%	%	100%



3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah merupakan implementasi tugas yang dilaksanakan secara nyata dan terpadu yang merupakan Kebijakan sebagai arah dan juga dijadikan sebagai Pedoman, pegangan, petunjuk aparatur Pemerintah agar tercapai kelancaran dan keterpaduan tugas dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran yang dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian **Visi dan Misi** Kabupaten Nunukan.

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Satpol PP dalam Renja 2024 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Nunukan sesuai dengan Misi 6 Bupati Nunukan yaitu "*Mewujudkan Tatanan Kehidupan Bermasyarakat yang Aman, Tertib dan Tentram*". Adapun untuk mendukung misi bupati tersebut diatas berikut kami sampaikan bahan pertimbangan rumusan Program dan Kegiatan seperti dibawah ini :

I. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2025 :

- Jumlah Program : 2
- Jumlah Kegiatan : 10
- Jumlah Sub Kegiatan : 31
- Pagu Indikatif APBD : Rp 17.779.419.053,00,-

II. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan di Tahun 2025 adalah :

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,



- Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota



c. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

III. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi Pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan di Tahun 2025 adalah :

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA;

d. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

e. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

g. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- i. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- j. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sedangkan Sub Kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja Negara sesuai dengan ketentuan berlaku.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan Sub Kegiatan baik untuk mencapai secara langsung sasaran untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada Tabel IV.1 seperti dibawah ini :



TABEL TC. 33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				17.779.419.053,00				15.942.320.776,48
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah		100%	14.192.298.106,00			100%	12.570.365.739,43
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Kabupaten Nunukan	10 Dokumen	187.113.350			10 Dokumen	189.545.824
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	1 Dokumen	38.210.500	APBD II		1 Dokumen	38.707.237



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	9 Dokumen	148.902.850	APBD II	Adanya kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam bentuk Rakor dan Bimtek	9 Dokumen	150.838.587
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kabupaten Nunukan	14 Bulan	9.592.597.548			14 Bulan	8.238.891.746
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Nunukan	79 Orang/Bulan	9.494.481.248	APBD II		79 Orang/Bulan	8.139.499.934
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Nunukan	150 Dokumen	49.652.300	APBD II		150 Dokumen	50.297.780
5.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kabupaten Nunukan	7 Dokumen	37.848.000	APBD II		7 Dokumen	38.340.024
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Nunukan	3 Laporan	10.616.000	APBD II		3 Laporan	10.754.008
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian		5 Unit	271.189.400		Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan mutu layanan)	5 Unit	192.993.897
7.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Nunukan	1 Paket	202.290.000	APBD II		1 Paket	123.750.000
8.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Nunukan	2 Orang	46.886.400	APBD II		2 Orang	47.120.832
9.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Nunukan	20 Orang	22.013.000	APBD II		20 Orang	22.123.065
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum		5 Unit	387.350.480	APBD II		5 Unit	378.591.176



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	1 Paket	5.643.880	APBD II		1 Paket	5.717.250
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	4 Paket	177.351.890	APBD II	Pemenuhan fasilitas sarana perkantoran	4 Paket	178.238.649
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	4 Paket	52.836.710	APBD II	Adanya tambahan pagu penyediaan barang cetak dan penggandaan	4 Paket	52.359.686
13.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	3 Paket	-	APBD II	Dialihkan pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor (penyesuaian nomenklatur)	3 Paket	-
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Nunukan	30 Laporan	151.518.000	APBD II		32 Laporan	142.275.591
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		2 Unit	249.750.000			2 Unit	39.000.000
15.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	2 Unit	249.750.000	APBD II		2 Unit	39.000.000
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Laporan	3.244.288.188			12 Laporan	3.285.550.446
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	114.186.000	APBD II	Adanya kenaikan penggunaan beban listrik dan mengantisipasi terjadinya musim kemarau untuk pembelian air tangki	12 Laporan	114.756.930
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Nunukan	12 Laporan	3.130.102.188	APBD II		12 Laporan	3.170.793.516



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan		16 Unit	260.009.140			16 Unit	245.792.651
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Nunukan	9 Unit	188.356.120	APBD II	Adanya penambahan kendaraan sebanyak 5 unit	9 Unit	186.297.901
19.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Nunukan	5 Unit	8.950.000	APBD II		5 Unit	8.994.750
20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Nunukan	2 Unit	62.703.020	APBD II		2 Unit	50.500.000
II.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		100%	3.587.120.947,00		Program Indikator Kinerja Utama (IKU)	100%	3.371.955.037,05
8.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Kabupaten Nunukan	503 Kasus	2.787.651.295		Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan mutu layanan)	503 Kasus	2.797.434.492
21.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kabupaten Nunukan	500 Kasus	1.269.173.485	APBD II		500 Kasus	1.281.865.220
22.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kabupaten Nunukan	3 Kasus	71.008.750	APBD II	Indikasi terjadinya demonstrasi lebih sedikit, Berdasarkan laporan pelaksanaan demonstrasi unjuk rasa sebanyak 3 kali	3 Kasus	71.920.589
23.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Nunukan	2 Dokumen	387.377.250	APBD II		2 Dokumen	382.413.154



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

24.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Nunukan	240 Dokumen	180.933.700	APBD II	Menindaklanjuti Instruksi Kemendagri No. 300.1.4/4980/BAK Terkait pengalokasian Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana satgas linmas dan Anggota Satlinmas	240 Dokumen	173.285.838
25.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Nunukan	25 Orang	656.763.110	APBD II		25 Orang	663.330.741
26.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kabupaten Nunukan	16 Dokumen	176.607.500	APBD II	Target capain naik, kerjasama antar lembaga lebih intens dalam rangka pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	18 Dokumen	178.373.575
27.	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kabupaten Nunukan	4 Laproran	45.787.500	APBD II	<i>Sub Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan penerima layanan)</i>	4 Laproran	46.245.375
9.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan		8 Perda/Perkada	654.385.270		Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan mutu layanan)	8 Perda/Perkada	489.434.145
28.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Kabupaten Nunukan	5 Laporan	80.287.500	APBD II		5 Laporan	73.792.000



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

29.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kabupaten Nunukan	60 Laporan	276.093.270	APBD II	Optimalisasi dan intensitas pengawasan terhadap pelanggaran perde/perkada yang berdampak terhadap peningkatan PAD (pembayaran pajak)	60 Laporan	114.657.600
30.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kabupaten Nunukan	50 Laporan	298.004.500	APBD II	Optimalisasi dan intensitas pengawasan terhadap pelanggaran perde/perkada yang berdampak terhadap peningkatan PAD (pembayaran pajak)	50 Laporan	300.984.545
10.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		2 Orang	145.084.382		Kegiatan Pendukung SPM (Sub urusan mutu layanan)	2 Orang	85.086.400
31.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kabupaten Bogor	2 Orang	145.084.382	APBD II		2 Orang	85.086.400



BAB V **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sebagai suatu penjabaran dari RENSTRA Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan yang disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi serta kewenangan Satpol PP Kabupaten Nunukan.

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun sebagai dasar pedoman dan acuan dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program kegiatan tahun 2025 yang berorientasi pada peningkatan kinerja dalam peningkatan ketenteraman, Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah (Perda/Perkada) yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Dengan adanya Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Nunukan ini, diharapkan sinergitas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Nunukan dapat lebih terarah, terintegrasi dan terkoordinasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Nunukan, 16 Juli 2024

KEPALA SATUAN,



MESAK ADIANTO, S. Sos., M. Si

NIP. 10700810 199803 1 008